

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pemberian otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi seharusnya dapat mendorong daerah untuk mencapai kemandirian fiskal sehingga terhindar dari fenomena flypaper effect. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pembangunan daerah dalam penerimaan daerah. Analisis pengelolaan kinerja keuangan daerah provinsi di Indonesia yang terdampak flypaper effect merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pengelolaan daerah.

Hasil analisis dan perbandingan yang telah diteliti menunjukkan:

- 1. Jumlah Provinsi di Indonesia yang terdampak flypaper effect bertambah setiap tahunnya.**
- 2. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah provinsi yang terdampak flypaper effect lebih rendah dibandingkan daerah provinsi yang tidak terdampak.** Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang mengalami flypaper effect belum mandiri dalam membiayai pemerintahannya dan memiliki pola hubungan konsultatif terhadap pemerintah pusat.
- 3. Rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah provinsi yang terdampak flypaper effect lebih rendah dibandingkan daerah**

provinsi yang tidak terdampak. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas keuangan daerah yang terdampak flypaper effect berada pada kategori cukup efektif. Kecuali pada tahun 2018 tingkat rata-rata rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif, hal ini disebabkan pada tahun tersebut beberapa daerah provinsi mengalami kenaikan dana perimbangan. Hal ini tentunya akan mendorong jumlah realisasi penerimaan daerah dengan mengandalkan dana perimbangan, disatu sisi pemerintahan pusat masih mengukur potensi rill daerah seperti tahun sebelumnya.

4. Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah provinsi yang terdampak flypaper effect lebih tinggi dibandingkan daerah provinsi yang tidak terdampak. Hal ini menunjukkan tingkatan efisiensi keuangan daerah yang kurang efisien. Pada tahun 2017 rasio efisiensi keuangan daerah yang terdampak berada pada kategori tidak efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang terjadi pada tahun 2017. Faktor ketidakefisienan keuangan daerah dikarenakan dilapangan pemerintah daerah yang cenderung merealisasikan 100% seluruh anggaran belanja yang sudah dianggarkan sebelumnya. Selain itu pengeluaran belanja daerah yang dialokasikan dan belanja tak terduga yang dilakukan pemerintah daerah diluar proyeksi anggaran yang sudah ada.

5. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang terdampak

flypaper effect berfluktuatif. Trend linier rasio dari tahun 2016-2019

yang dihasilkan menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang menurun. Penyebab utama rasio kemandirian daerah yang terdampak flypaper effect berfluktuatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor external dan internal pemerintah daerah. Untuk faktor internalnya berupa kualitas regulasi daerah, kurang optimalnya pemungutan dan pengelolaan PAD, dan masih sangat tergantung dengan TKDD. Sedangkan untuk faktor externalnya berupa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, laju perekonomian daerah yang lambat sebagai basis pungutan daerah. Kemampuan pemda untuk menghimpun penerimaan sangatlah bervariasi. Variasi kapasitas fiskal itu ditentukan oleh intensitas kegiatan ekonomi dan kekayaan sumber daya alam. Selain itu setiap pemda memiliki kebutuhan belanjanya masing-masing. Akibatnya akan terdapat kesenjangan antara kebutuhan belanja dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh berbagai pemerintah daerah. Oleh karena itu setiap pemda memiliki dana transfer yang berbeda-beda dan terdapat pengecualian kepada beberapa daerah tertentu yang biasa dinamakan Dana Otonomi Khusus.

6. Rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah yang terdampak

flypaper effect berfluktuatif. Trend linier dari tahun 2016-2019 yang

dihasilkan menunjukkan peningkatan efektivitas keuangan daerah pada provinsi yang terdampak flypaper effect. Faktor yang menyebabkan

rasio efektivitas setiap tahunnya mengalami perubahan disebabkan oleh perubahan kemampuan rill daerah tahunannya. Hal ini akan berdampak pada target anggaran pertahunnya. Sehingga pemerintah daerah akan lebih berusaha dalam memaksimalkan penerimaan daerahnya. Penerimaan daerah pada rasio efektivitas mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah

- 7. Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah yang terdampak flypaper effect berfluktuatif.** Trend linear dari tahun 2016-2019 yang dihasilkan menunjukkan penurunan efisiensi keuangan daerah pada provinsi yang terdampak flypaper effect. Terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan fluktuasi rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah provinsi yang terdampak. Faktor ketidakefisienan keuangan daerah dikarenakan dilapangan pemerintah daerah yang cenderung merealisasikan 100% seluruh anggaran belanja yang sudah dianggarkan sebelumnya. Selain itu pengeluaran belanja daerah yang dialokasikan dan belanja tak terduga yang dilakukan pemerintah daerah diluar proyeksi anggaran yang sudah ada. Faktor efisiensi keuangan daerah yang pertama adalah keefektifitasan penerimaan daerah dan kemandirian keuangan daerah sehingga penerimaan daerah jauh lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Faktor yang kedua adalah realisasi belanja yang terdampak pemotongan maupun alokasi atau belum terlaksanakannya program pemerintah daerah, yang menjadikan pengendapan penerimaan daerah maupun pengurangan realisasi belanja daerah.

5.2.Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel rasio pengelolaan kinerja keuangan daerah. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel rasio kemampuan keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.
2. Penelitian hanya menggunakan empat tahun anggaran terbaru dari tahun 2016-2019 untuk dijadikan bahan analisis dikarenakan laporan realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 yang belum di audit. Mengingat pandemi yang dialami Indonesia semenjak awal tahun 2020 menyebabkan terjadinya beberapa kali realokasi dana APBN dan APBD yang menyebabkan belum terdapatnya laporan realisasi anggaran yang sudah diaudit.

5.3.Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel rasio pengelolaan keuangan daerah terhadap pemerintah daerah yang terdampak *flypaper effect*.
2. Peneliti selanjutnya perlu menambahkan dengan tahun anggaran yang terbaru dengan menggunakan laporan realisasi anggaran yang telah diaudit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. d. (2006). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- D. Kartika, I. K. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Dapartemen Dalam Negeri. (1996). Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020). *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*. Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id
- Dwirandra, A. (2006). Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Prvinsi Bali 2002-2006. *Universitar Udayana Bali*.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Vol. Pertama)*. Jakarta.
- Haryanto, A. (2014). Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 2014*.
- Kurnia, E. D. (2013). Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurusan Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya Malang*.
- Kusumadewi, D. R. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mashun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Oates, W. (1999). An Easy Of Fiscal Federalism. *Journal of Economics Literature* 37.

- Rakyat, K. P. (2019). Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . 2019.
- Republik Indonesia. (2003). UU No.17 Tahun 2003. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia . (n.d.). Undang-undang No. 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (1999). UU No. 22 Tahun 1999.
- Republik Indonesia. (2005). PP No. 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). UU No 28 Tahun 2009. *Jenis Pendapatan Pajak Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang No 23 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. (n.d.). UU No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, 2004.
- Sagbas, I. d. (2004). Intergovernmental Transfer and The Flypaper Effect In Turkey.
- Saputra, D. (2014). ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATRA BARAT.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol.1 No 3* .
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang.
- Vintari, S. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Widodo, H. T. (1990). *Indikator Ekonomi* (Vol. 10). Kanisius.
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*. Malang: Bayumedia .

LAMPIRAN

Data Tahun 2016

No	Uraian	Pendapatan Daerah APBD	Pendapatan Daerah Realisasi	Pendapatan Asli Daerah Realisasi	Dana Perimbangan Realisasi	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi	5. Belanja Daerah Realisasi
1	Prov. Aceh	12,551,166,051,800	12,364,563,976,147	2,060,180,945,551	1,572,466,631,620	8,731,916,398,976	12,119,713,196,647
2	Prov. Sumatera Utara	9,973,988,772,169	10,440,618,930,401	4,954,833,100,869	5,219,273,756,069	266,512,073,463	9,476,423,914,545
3	Prov. Sumatera Barat	4,595,703,758,691	4,624,674,545,940	1,964,148,975,799	2,576,754,985,110	83,770,585,031	4,504,037,258,760
4	Prov. Riau	7,588,647,540,131	6,942,926,673,092	3,110,656,139,757	3,824,481,733,335	7,788,800,000	8,731,938,149,824
5	Prov. Jambi	3,441,962,712,618	3,394,795,872,564	1,233,514,664,110	1,547,888,628,151	613,392,580,303	3,294,484,968,673
6	Prov. Sumatera Selatan	7,036,774,156,635	6,582,780,929,676	2,546,177,544,349	2,506,312,481,085	1,530,290,904,243	4,962,572,330,784
7	Prov. Bengkulu	2,417,157,014,570	2,355,563,884,999	731,556,734,070	1,616,462,129,843	7,545,021,086	2,029,690,295,480
8	Prov. Lampung	5,350,902,785,048	5,588,722,511,301	2,368,796,251,247	3,158,712,900,538	61,213,359,516	5,476,921,595,655
9	Prov. DKI Jakarta	59,004,784,464,142	53,784,706,312,513	36,888,017,587,716	15,271,661,452,714	1,625,027,272,083	47,128,810,245,854
10	Prov. Jawa Barat	26,806,857,280,963	27,694,035,120,859	17,042,895,113,672	10,622,671,443,683	28,468,563,504	27,621,964,467,242
11	Prov. Jawa Tengah	22,026,201,874,000	19,632,577,136,890	11,541,029,720,310	8,017,297,595,983	74,249,820,597	19,354,374,825,983
12	Prov. DI Yogyakarta	3,921,068,617,127	3,899,192,985,314	1,673,749,196,522	1,697,108,535,480	528,335,253,312	3,847,962,965,847
13	Prov. Jawa Timur	22,663,137,346,213	24,962,122,477,070	15,817,795,024,797	9,039,003,358,881	105,324,093,392	23,859,953,926,118
14	Prov. Kalimantan Barat	4,761,612,670,000	4,494,428,711,520	1,664,338,991,973	1,860,789,737,696	969,299,981,851	4,320,618,793,066
15	Prov. Kalimantan Tengah	4,235,177,751,130	3,548,504,778,637	1,158,303,928,014	1,878,977,521,255	511,223,329,368	3,174,705,762,282
16	Prov. Kalimantan Selatan	5,034,047,128,000	5,218,443,529,482	2,499,862,900,404	2,677,349,255,301	41,231,373,777	5,178,766,888,168

17	Prov. Kalimantan Timur	10,296,924,310,000	7,985,727,918,251	4,029,364,843,886	3,941,626,961,365	14,736,113,000	7,601,242,338,859
18	Prov. Sulawesi Utara	3,001,754,654,000	2,885,186,120,406	981,044,559,607	1,880,906,286,799	23,235,274,000	2,801,145,395,510
19	Prov. Sulawesi Tengah	3,312,288,835,750	3,175,692,919,654	939,092,069,082	2,210,604,520,193	25,996,330,379	3,178,114,481,726
20	Prov. Sulawesi Selatan	6,851,571,777,550	7,162,588,691,183	3,449,561,308,105	3,699,816,673,661	13,210,709,417	6,930,978,668,388
21	Prov. Sulawesi Tenggara	2,641,119,191,028	2,807,076,756,255	753,657,954,464	2,037,098,801,791	16,320,000,000	2,663,870,374,406
22	Prov. Bali	5,376,044,679,940	5,249,017,754,256	3,041,195,258,456	1,867,010,930,284	340,811,565,516	5,420,933,529,304
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	3,576,520,815,258	3,949,996,798,343	1,359,844,019,438	2,583,032,589,905	7,120,189,000	3,764,301,951,075
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	3,876,020,088,000	3,875,554,164,669	995,186,120,952	2,839,657,758,567	40,710,285,150	3,702,912,449,649
25	Prov. Maluku	2,479,133,963,091	2,547,550,608,749	466,208,198,074	2,041,954,997,675	39,387,413,000	2,573,826,897,671
26	Prov. Papua	12,438,141,557,077	12,567,839,768,233	1,019,732,912,606	3,595,089,073,914	7,953,017,781,713	11,968,494,421,588
27	Prov. Maluku Utara	2,241,173,725,000	2,022,296,143,265	280,150,113,343	1,453,204,504,116	288,941,525,806	2,024,033,802,465
28	Prov. Banten	8,005,287,474,000	8,656,395,495,445	5,463,156,734,851	3,185,553,940,739	7,684,819,855	8,925,813,442,214
29	Prov. Bangka Belitung	2,015,482,384,541	1,949,866,524,267	574,258,443,820	1,126,284,913,345	249,323,167,102	2,069,868,292,386
30	Prov. Gorontalo	1,682,037,855,815	1,584,307,613,580	311,223,202,412	1,232,492,163,694	40,592,247,474	1,595,894,748,734
31	Prov. Kepulauan Riau	3,026,806,718,975	2,914,857,620,563	1,079,309,741,999	1,464,904,579,643	370,643,298,921	2,865,884,362,891
32	Prov. Papua Barat	6,165,287,623,000	6,740,386,627,580	338,811,109,229	3,221,910,435,351	3,179,665,083,000	6,464,612,242,303
33	Prov. Sulawesi Barat	1,706,336,865,096	1,688,606,848,413	277,686,126,682	1,364,157,113,820	46,763,607,911	1,765,977,558,869
34	Prov. Kalimantan Utara	1,978,279,904,984	2,332,986,748,692	507,955,516,972	1,579,537,873,785	245,493,357,935	2,556,533,716,397

Data Tahun 2017

No	Uraian	Pendapatan Daerah APBD	Pendapatan Daerah Realisasi	Pendapatan Asli Daerah Realisasi	Dana Perimbangan Realisasi	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi	5. Belanja Daerah Realisasi
1	Prov. Aceh	14,291,939,315,863	14,350,990,515,017	2,276,305,568,814	3,802,879,497,580	8,271,805,448,623	13,832,848,610,133
2	Prov. Sumatera Utara	12,170,582,105,913	12,234,837,881,539	5,287,469,401,500	6,928,134,939,913	19,233,540,126	12,518,868,105,165
3	Prov. Sumatera Barat	6,110,976,953,502	6,066,826,853,956	2,134,010,519,503	3,868,405,969,982	64,410,364,471	5,759,818,392,401
4	Prov. Riau	8,859,017,595,981	7,902,473,692,383	3,360,008,975,199	4,539,386,717,184	3,078,000,000	9,188,741,983,688
5	Prov. Jambi	4,163,724,816,402	4,311,792,610,112	1,580,304,867,342	2,723,260,588,950	8,227,153,820	4,132,941,881,087
6	Prov. Sumatera Selatan	8,195,110,542,121	8,195,968,131,800	3,031,633,624,304	4,061,113,371,545	1,103,221,135,951	6,409,382,404,458
7	Prov. Bengkulu	3,041,325,078,997	2,804,577,827,356	804,575,838,594	1,997,884,640,743	2,117,348,019	2,868,814,054,625
8	Prov. Lampung	6,723,785,171,614	6,813,755,009,492	2,750,596,478,331	2,643,744,659,461	1,419,413,871,700	6,948,838,067,138
9	Prov. DKI Jakarta	62,466,130,203,554	64,823,887,369,819	43,901,488,807,742	18,969,291,389,929	1,953,107,172,148	51,066,081,379,887
10	Prov. Jawa Barat	30,540,901,041,552	32,163,957,645,604	18,081,123,739,824	13,981,445,314,589	101,388,591,191	32,706,749,485,377
11	Prov. Jawa Tengah	23,467,518,025,000	23,703,174,631,507	12,547,513,389,400	11,067,786,491,093	87,874,751,014	22,884,713,018,754
12	Prov. DI Yogyakarta	4,988,379,317,715	5,085,241,619,288	1,851,973,396,065	2,379,856,861,840	853,411,361,383	4,920,626,776,619
13	Prov. Jawa Timur	27,932,994,314,123	29,864,031,011,506	17,324,177,664,424	12,494,048,645,633	45,804,701,449	28,878,134,635,609
14	Prov. Kalimantan Barat	5,095,395,280,000	5,389,204,121,646	1,945,647,317,494	3,420,092,372,152	23,464,432,000	5,259,793,610,869
15	Prov. Kalimantan Tengah	4,086,898,379,226	4,098,485,315,190	1,342,330,618,785	2,588,405,454,988	167,749,241,417	3,686,889,215,702
16	Prov. Kalimantan Selatan	5,499,059,991,000	5,609,663,321,767	2,841,891,516,564	2,712,223,930,644	55,547,874,559	5,845,800,625,741
17	Prov. Kalimantan Timur	8,098,900,000,000	8,158,103,650,157	4,588,751,727,469	3,533,009,585,813	36,342,336,875	8,227,956,959,422
18	Prov. Sulawesi Utara	3,556,372,800,000	3,731,901,683,007	1,146,674,827,814	2,508,041,622,193	77,185,233,000	3,580,571,793,429
19	Prov. Sulawesi Tengah	3,579,386,410,150	3,638,342,669,182	958,212,001,718	2,626,109,853,195	54,020,814,269	3,445,777,071,451
20	Prov. Sulawesi Selatan	8,894,428,775,365	9,055,278,907,514	3,679,083,943,914	5,354,507,388,022	21,687,575,578	8,892,158,631,536
21	Prov. Sulawesi Tenggara	3,545,198,442,343	3,534,576,646,771	806,253,869,893	2,675,596,602,878	52,726,174,000	3,554,111,159,552

22	Prov. Bali	6,222,703,627,308	5,992,161,668,458	3,398,472,278,306	2,535,995,754,659	57,693,635,493	6,070,536,923,735
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	4,791,397,359,569	5,083,156,004,900	1,684,468,709,594	3,268,927,294,306	129,760,001,000	5,255,320,273,857
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	4,722,736,609,000	4,700,213,492,590	1,047,491,567,027	3,643,692,862,110	9,029,063,453	4,634,876,188,618
25	Prov. Maluku	2,860,026,790,976	2,817,045,157,656	430,866,044,124	2,370,129,513,532	16,049,600,000	2,834,168,580,139
26	Prov. Papua	13,968,876,703,796	13,006,812,664,927	1,020,372,304,364	3,780,551,017,562	8,205,889,343,000	13,303,282,243,301
27	Prov. Maluku Utara	2,864,175,974,702	2,275,580,346,077	327,469,790,428	1,542,871,048,946	405,239,506,703	2,258,807,481,032
28	Prov. Banten	9,790,923,478,551	9,706,065,383,439	5,756,371,374,247	3,930,029,963,372	19,664,045,820	9,512,813,119,364
29	Prov. Bangka Belitung	2,355,579,069,316	2,251,024,652,420	709,832,181,818	1,539,960,002,502	1,232,468,100	2,359,078,163,818
30	Prov. Gorontalo	1,831,692,829,014	1,773,047,305,717	348,267,663,013	1,416,764,276,967	8,015,365,737	1,738,195,528,213
31	Prov. Kepulauan Riau	3,201,558,825,099	3,252,237,500,366	1,094,788,614,304	2,156,268,926,062	1,179,960,000	3,272,498,783,538
32	Prov. Papua Barat	6,888,867,177,840	7,800,891,757,888	470,072,402,934	3,313,925,466,954	4,016,893,888,000	7,016,193,285,404
33	Prov. Sulawesi Barat	1,813,836,670,297	1,831,985,569,431	296,935,168,455	1,532,367,605,917	2,682,795,058	1,927,377,319,821
34	Prov. Kalimantan Utara	2,335,152,982,580	2,232,580,219,814	482,740,846,006	1,677,613,805,095	72,225,568,714	2,454,188,857,402

Data Tahun 2018

No	Uraian	Pendapatan Daerah APBD	Pendapatan Daerah Realisasi	Pendapatan Asli Daerah Realisasi	Dana Perimbangan Realisasi	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi	5. Belanja Daerah Realisasi
1	Prov. Aceh	14,622,475,324,280	14,427,783,075,799	2,359,385,393,646	3,735,791,721,607	8,332,605,960,546	12,306,306,187,481
2	Prov. Sumatera Utara	13,037,539,478,554	12,703,058,587,891	5,638,960,579,479	7,055,134,429,266	8,963,579,146	12,563,387,549,665
3	Prov. Sumatera Barat	6,431,896,764,300	6,292,287,631,026	2,275,090,068,587	3,930,814,210,887	86,383,351,552	6,267,376,231,091
4	Prov. Riau	9,236,880,300,120	8,478,991,024,966	3,638,995,740,121	4,827,923,284,845	12,072,000,000	8,469,560,058,792
5	Prov. Jambi	4,218,022,336,599	4,412,464,565,281	1,656,569,597,282	2,745,221,967,999	10,673,000,000	4,198,255,718,275

6	Prov. Sumatera Selatan	6,865,580,106,642	9,141,371,395,100	3,528,010,712,184	5,513,017,500,414	100,343,182,502	7,941,143,670,102
7	Prov. Bengkulu	2,992,599,128,571	2,851,808,282,197	872,257,738,966	1,478,045,278,636	501,505,264,595	2,979,578,236,902
8	Prov. Lampung	7,507,850,214,620	7,098,983,642,603	2,864,235,753,079	2,816,327,377,991	1,418,420,511,533	7,538,988,966,120
9	Prov. DKI Jakarta	66,029,983,254,737	61,235,824,747,633	43,327,136,602,811	17,855,177,072,924	53,511,071,898	61,410,121,851,157
10	Prov. Jawa Barat	31,961,201,705,866	33,919,022,032,348	19,642,915,448,764	14,208,000,403,584	68,106,180,000	33,333,824,961,824
11	Prov. Jawa Tengah	24,413,659,858,000	24,702,318,190,582	13,711,836,037,849	10,933,776,831,696	56,705,321,037	24,478,632,557,339
12	Prov. DI Yogyakarta	5,182,969,634,012	5,443,179,144,513	2,040,723,348,531	2,317,436,811,403	1,085,018,984,579	5,296,403,530,714
13	Prov. Jawa Timur	29,024,306,233,760	31,939,187,379,443	18,531,062,021,823	13,295,784,849,272	112,340,508,347	30,662,093,021,870
14	Prov. Kalimantan Barat	5,308,157,622,087	5,660,058,614,041	2,194,867,823,991	3,444,983,949,610	20,206,840,440	5,341,404,834,197
15	Prov. Kalimantan Tengah	4,412,108,656,900	4,678,157,675,829	1,616,521,660,227	2,904,070,685,822	157,565,329,780	4,547,699,750,661
16	Prov. Kalimantan Selatan	5,899,952,371,644	6,592,642,996,632	3,557,316,628,830	2,986,689,751,663	48,636,616,139	6,082,587,192,592
17	Prov. Kalimantan Timur	8,366,250,000,000	10,669,542,801,846	5,800,270,285,306	4,829,780,659,372	39,491,857,169	9,345,057,063,691
18	Prov. Sulawesi Utara	3,779,295,766,441	3,779,781,721,313	1,253,804,977,827	2,505,226,773,486	20,749,970,000	3,656,101,961,038
19	Prov. Sulawesi Tengah	3,827,979,372,600	3,881,148,079,297	1,016,628,663,677	2,731,430,163,822	133,089,251,798	3,628,013,037,630
20	Prov. Sulawesi Selatan	9,482,139,783,434	9,252,221,942,175	3,948,349,252,423	5,287,519,277,687	16,353,412,065	9,322,152,987,945
21	Prov. Sulawesi Tenggara	3,521,771,323,096	3,785,562,578,471	903,949,000,785	2,865,113,577,686	16,500,000,000	3,586,474,436,543
22	Prov. Bali	5,980,912,107,128	6,259,367,608,393	3,718,499,635,346	2,493,979,973,047	46,888,000,000	5,998,547,032,282
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	5,230,285,800,854	4,941,246,974,629	1,660,417,707,373	3,212,386,689,010	68,442,578,246	5,239,531,399,450
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	4,882,077,980,000	4,781,089,962,593	1,095,269,978,577	3,680,327,636,180	5,492,347,836	4,846,839,267,378
25	Prov. Maluku	3,463,861,350,568	3,074,608,120,191	465,779,724,332	2,599,439,395,859	9,389,000,000	3,068,953,726,757
26	Prov. Papua	13,548,512,203,846	13,489,981,203,765	1,050,372,166,512	4,414,240,479,168	8,025,368,558,085	13,186,886,938,770
27	Prov. Maluku Utara	2,488,246,144,000	2,489,067,421,493	358,325,359,307	1,753,958,965,574	376,783,096,612	2,438,771,027,418
28	Prov. Banten	10,365,616,979,717	10,320,366,318,360	6,329,138,234,646	3,978,289,425,586	12,938,658,128	9,992,819,311,365
29	Prov. Bangka Belitung	2,490,588,273,614	2,556,977,711,924	850,441,774,831	1,436,593,991,243	269,941,945,850	2,364,345,563,587

30	Prov. Gorontalo	1,815,052,085,811	1,800,201,701,297	384,435,306,403	1,398,182,154,507	17,584,240,387	1,828,164,979,480
31	Prov. Kepulauan Riau	3,494,771,742,620	3,500,007,224,302	1,220,768,246,945	2,278,002,977,357	1,236,000,000	3,419,789,812,825
32	Prov. Papua Barat	7,316,831,455,000	7,309,838,197,631	459,243,073,550	2,841,657,646,081	4,008,937,478,000	6,947,065,392,851
33	Prov. Sulawesi Barat	1,869,048,378,479	1,819,085,595,567	301,499,588,175	1,495,847,224,209	21,738,783,183	1,746,622,067,296
34	Prov. Kalimantan Utara	2,359,569,825,203	2,420,663,929,090	574,088,357,593	1,825,311,428,438	21,264,143,059	2,352,884,155,459

Data Tahun 2019							
No	Uraian	Pendapatan Daerah APBD	Pendapatan Daerah Realisasi	Pendapatan Asli Daerah Realisasi	Dana Perimbangan Realisasi	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi	5. Belanja Daerah Realisasi
1	Prov. Aceh	15,523,728,692,158	15,752,800,901,652	2,698,912,471,144	4,692,203,470,487	8,361,684,960,021	15,787,883,385,490
2	Prov. Sumatera Utara	15,327,752,517,586	13,079,598,635,469	5,761,270,412,051	7,300,647,588,241	17,680,635,177	13,440,323,705,747
3	Prov. Sumatera Barat	6,728,868,628,900	6,390,337,204,584	2,328,432,873,686	4,027,349,115,496	34,555,215,402	6,551,278,880,635
4	Prov. Riau	9,129,049,316,920	8,703,232,610,160	3,558,210,585,340	5,136,706,027,820	8,315,997,000	8,690,390,951,117
5	Prov. Jambi	4,517,553,135,365	4,575,192,849,736	1,651,089,944,335	2,896,753,806,401	27,349,099,000	4,824,366,351,413
6	Prov. Sumatera Selatan	9,660,923,645,962	9,280,742,072,449	3,494,510,853,252	5,698,701,179,582	87,530,039,615	9,618,074,513,841
7	Prov. Bengkulu	3,355,171,246,507	2,934,057,941,394	826,674,936,050	2,076,151,739,620	31,231,265,724	3,118,303,518,797
8	Prov. Lampung	7,772,923,449,832	7,266,993,438,828	3,018,067,291,160	2,627,195,349,110	1,621,730,798,558	7,058,713,889,024
9	Prov. DKI Jakarta	74,776,745,638,013	62,300,679,833,068	45,707,400,003,802	14,494,393,043,179	2,098,886,786,087	64,938,363,682,013
10	Prov. Jawa Barat	34,882,308,945,575	36,037,894,762,461	21,244,266,598,018	14,715,372,046,649	78,256,117,794	35,833,086,126,517
11	Prov. Jawa Tengah	25,965,581,322,000	25,859,780,137,936	14,437,914,236,398	11,334,903,060,673	86,962,840,865	26,151,062,842,457
12	Prov. DI Yogyakarta	5,663,778,510,743	5,699,357,232,441	2,082,795,334,435	2,385,702,912,253	1,230,858,985,753	5,544,650,430,330
13	Prov. Jawa Timur	31,927,102,731,819	33,455,209,327,987	19,327,125,485,406	13,941,687,209,995	186,396,632,586	33,967,109,632,815
14	Prov. Kalimantan Barat	5,760,665,710,092	5,939,753,156,804	2,301,306,937,992	3,620,122,786,312	18,323,432,500	5,677,397,310,139

15	Prov. Kalimantan Tengah	5,147,443,691,519	4,990,195,455,015	1,776,231,952,740	3,173,404,284,486	40,559,217,789	5,064,142,623,788
16	Prov. Kalimantan Selatan	6,966,945,852,547	6,756,797,304,944	3,498,836,748,488	3,145,120,773,967	112,839,782,489	7,005,774,789,958
17	Prov. Kalimantan Timur	10,549,624,013,250	11,775,086,446,200	6,555,852,805,408	5,176,264,298,792	42,969,342,000	11,387,618,509,351
18	Prov. Sulawesi Utara	4,098,657,797,000	3,940,225,396,821	1,286,069,364,576	2,605,769,430,045	48,386,602,200	4,156,494,291,530
19	Prov. Sulawesi Tengah	4,149,229,912,367	4,128,153,120,870	1,090,854,785,058	2,994,301,818,097	42,996,517,715	4,098,771,219,451
20	Prov. Sulawesi Selatan	9,898,600,069,886	9,573,910,861,961	4,138,631,215,915	5,388,320,704,592	46,958,941,454	9,491,447,901,636
21	Prov. Sulawesi Tenggara	4,029,396,384,379	4,166,543,383,146	1,128,441,587,992	2,947,699,275,377	90,402,519,777	4,128,549,681,525
22	Prov. Bali	6,323,498,505,003	6,645,538,871,170	4,023,156,314,135	2,548,063,873,035	74,318,684,000	6,518,313,866,322
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	5,244,782,852,000	5,197,727,488,242	1,807,482,745,855	3,342,865,637,337	47,379,105,050	5,148,158,519,515
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	5,347,158,022,105	5,354,092,405,679	1,258,958,953,288	4,067,952,844,498	27,180,607,893	5,277,064,650,987
25	Prov. Maluku	3,203,799,759,626	3,108,914,880,044	482,805,590,256	2,622,545,724,004	3,563,565,784	2,974,061,950,245
26	Prov. Papua	13,978,117,822,487	15,239,936,933,219	2,027,638,465,327	4,522,405,712,374	8,689,892,755,518	13,421,675,432,411
27	Prov. Maluku Utara	2,742,085,743,000	2,688,174,140,827	433,448,363,470	2,214,233,606,679	40,492,170,678	2,657,499,985,303
28	Prov. Banten	11,831,983,759,800	11,201,873,129,054	7,022,309,916,624	4,167,138,881,097	12,424,331,333	11,324,588,102,331
29	Prov. Bangka Belitung	2,709,871,336,952	2,694,205,659,655	826,701,095,332	1,742,433,563,849	125,071,000,474	2,776,076,365,845
30	Prov. Gorontalo	1,955,666,594,256	1,941,076,769,546	433,427,781,399	1,495,154,617,824	12,494,370,323	1,939,458,991,539
31	Prov. Kepulauan Riau	3,629,564,170,992	3,939,451,004,378	1,311,704,305,173	2,573,155,268,205	54,591,431,000	3,653,938,156,214
32	Prov. Papua Barat	8,479,203,287,742	11,339,763,889,679	483,725,598,745	6,907,515,331,934	3,948,522,959,000	9,269,298,181,082
33	Prov. Sulawesi Barat	2,104,832,040,777	2,034,819,568,403	345,208,054,042	1,652,046,786,611	37,564,727,750	2,006,026,015,782
34	Prov. Kalimantan Utara	2,568,161,043,090	2,610,072,420,324	655,846,206,223	1,953,289,844,101	936,370,000	2,416,478,351,660